

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis pasti akan menghadapi sebuah risiko. Risiko yang muncul tidak dapat dihindarkan, sehingga perusahaan harus mempersiapkan cara untuk menangani risiko-risiko yang akan terjadi. Kondisi perekonomian bisnis yang penuh dengan ketidakpastian dan fenomena persaingan bisnis serta kompleksitas perusahaan membuat perusahaan dihadapkan pada risiko. Penerapan manajemen risiko membantu mengurangi risiko-risiko yang akan terjadi. Penerapan manajemen risiko dinilai baik, apabila perusahaan mempunyai kematangan manajemen risiko yang tinggi (CRMS Indonesia, 2017). Pada laporan tahunan, pengungkapan manajemen risiko menjadi acuan yang dapat dipertimbangkan untuk para investor untuk mengambil suatu keputusan.

Pengungkapan manajemen risiko merupakan salah satu solusi yang dapat membantu publik untuk dapat percaya kembali pada keakuratan pelaporan keuangan dan meminimalkan malpraktik dalam pelaporan keuangan (Utami, 2015). Program pengungkapan manajemen risiko mempunyai manfaat yang lebih karena memberikan informasi tentang profil risiko perusahaan (Agista & Mimba, 2017). Akibatnya, untuk menghindari kemungkinan kebangkrutan, perusahaan harus menganggap risiko sebagai salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risikonya, dan dengan demikian hal tersebut memerlukan sistem manajemen risiko perusahaan. Sistem manajemen risiko yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya meningkatkan pelaporannya keuangan serta menjaga reputasinya. Diperlukan pengawasan yang memadai agar sistem manajemen risiko yang ditetapkan oleh perusahaan dapat berjalan efektif (Halim et al., 2017).

Kasus yang menyita perhatian masyarakat yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia cabang Tambun pada tahun 2019 yang dilakukan oleh asisten manajer yang terdapat *overstatement* kas induk sebesar Rp 1.477.974.200, rekening aktiva valas sebesar Rp 8.836.500.000. Penyalahgunaan 3 rekening deposito milik nasabah sebesar Rp 3.500.000.000, rekening persekot intern perantara *money charger* sebesar Rp 54.225.000. Terdapat dugaan aliran dana dengan berbagai skema grup Bank Rakyat Indonesia kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan asistent manajer. Terkait hubungan transaksi dengan pihak terafiliasi tidak ditemukan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang relevan. Akibat dari kurangnya pengungkapan informasi menjadikan tingkat kepercayaan para investor dan pengguna laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia terhadap pengungkapan laporan keuangan menjadi menurun yang bisa disebut risiko reputasi dan berdampak buruk pada harga saham perusahaan menjadi turun sehingga para investor mengalami kerugian akibat mengambil keputusan yang tidak tepat karena kurangnya pengungkapan informasi mengenai manajemen risiko ([ww.kontan.co.id](http://ww.kontan.co.id))

Menanggapi kasus ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau agar perbankan harus melakukan penguatan internal (*Good Corporate Governance*) dan meningkatkan manajemen risiko dengan mengungkapkan informasi risiko-risiko yang terjadi untuk mencegah hal yang sama terjadi kembali dan menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan. ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)). Kasus semacam ini dapat terjadi apabila bank mengabaikan risiko bisnis yang dihadapi perusahaan, dimana risiko tersebut tentu dapat mengancam keberlangsungan dan merugikan banyak pihak terutama investor dan menyebabkan kepercayaan pengguna laporan berkurang. Oleh karena itu, perusahaan perbankan tidak seharusnya mengabaikan risiko dalam bisnis perusahaan yang mungkin terjadi, sehingga perusahaan perlu melakukan pengungkapan manajemen risiko untuk mengelola risiko dan untuk memberikan informasi yang dapat menambah kepercayaan pengguna laporan keuangan.

Pengungkapan risiko dinilai merupakan salah satu bentuk akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham. Dengan melakukan tata kelola risiko seperti pengungkapan risiko, perusahaan dapat mengkomunikasikan profil risiko, selera risiko, dan manajemen risiko mereka (Nahar et al., 2016). Pengungkapan manajemen risiko juga untuk memonitor risiko dan mendeteksi potensi masalah sehingga dapat melakukan tindakan lebih awal agar masalah tidak terjadi (Mokhtar & Mellett, 2013). Beberapa perusahaan menggunakan *Framework* ISO 31000 dalam menjalankan manajemen risiko.

Pada Februari 2018, ISO (*International Organization for Standardization*) menerbitkan *International Standar ISO 31000:2018 Risk Management-Guidelines* sebagai revisi terhadap standar terdahulu, *ISO 31000:2009 Risk Management-Principles and Guidelines* (Susilo & Riwu, 2018). ISO 31000 merupakan sebuah standar internasional yang dikeluarkan oleh ISO untuk mengelola risiko. Standar internasional ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan individu. ISO 31000:2018 dapat digunakan untuk seluruh jenis entitas/organisasi dengan semua jenis risiko yang dihadapi. ISO 31000:2018 dibangun dari kepedulian *stakeholders* terhadap pengelolaan risiko dan tidak hanya pada penilai risiko yang profesional. ISO 31000:2018 membantu perusahaan dalam mengelola efektifitas strategi manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko.

ISO 31000:2018 memiliki tujuan untuk melibatkan budaya individu dan entitas agar peka terhadap pentingnya memantau risiko. ISO 31000:2018 memiliki keunggulan *esensial* dalam memberikan panduan yang lebih mendetail dan komprehensif. Keberadaan prinsip manajemen risiko, penetapan konteks eksternal, dan pemisahan antara kerangka kerja dengan proses manajemen risiko menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh ISO 31000. Fakta bahwa standar ISO 31000 telah diakui dan diadaptasi sebagai standar manajemen risiko di hingga 70 negara juga menunjukkan bahwa ISO 31000 telah bertahan dari uji kelayakan oleh berbagai negara (Susilo & Riwu, 2018).

Salah satu sektor yang tidak pernah lepas dari ketidakpastian adalah sub sektor perbankan. Sudah bertahun-tahun perbankan dihadapkan dengan berbagai risiko seperti penggelapan dana nasabah yang membuat bank dihadapkan pada risiko reputasi karena lunturnya kepercayaan publik terhadap perbankan. Kewajiban pengungkapan manajemen risiko tercantum pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 yaitu keuangan perusahaan harus memiliki peraturan yang lebih integritas/ketat terkait pengungkapan risiko dibandingkan dengan perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peraturan ini didasarkan semakin kompleksnya aktivitas perbankan, maka risiko yang dihadapi akan semakin meningkat, dengan adanya peningkatan risiko yang dihadapi oleh perbankan maka perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko.

Peranan penting dalam manajemen risiko adalah dengan diterapkannya *good corporate governance* dalam perbankan (Hussain & Al-Ajmi, 2012) yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan jasa keuangan melalui peraturan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 dalam pasal 2 ayat 1 yaitu Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip *corporate goverance* yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Peningkatan *corporate governance* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko perusahaan. Dengan cara ini, kualitas pelaporan keuangan perusahaan akan meningkat karena informasi yang disampaikan tidak hanya informasi terkait keuangan tetapi juga pengungkapan informasi terkait risiko perusahaan. Konsep *Good Corporate Governance* terbentuk demi terciptanya transparansi pengelolaan perusahaan bagi semua pengguna laporan keuangan yang nantinya bertujuan untuk memunculkan kepercayaan baik bagi investor atau pihak lain dan mencegah atau mengurangi tindak manipulasi yang akan berdampak pada perusahaan. *Good Corporate Governance* yang diindikasikan mempengaruhi terhadap pengungkapan risiko yakni kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit serta komite manajemen risiko.

Kepemilikan Manajerial yaitu manajer bertanggung jawab atas seluruhnya aktivitas usaha yang telah dilakukan dengan menerapkan pengungkapan laporan tahunan. Apabila semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen pada suatu perusahaan, sehingga manajemen perusahaan cenderung lebih giat melaksanakan tanggung jawabnya untuk kepentingan pemegang saham dimana adalah dirinya sendiri, yaitu dengan mengungkapkan pengungkapan manajemen risiko dengan lebih luas (Swarte et al., 2019).

Kepemilikan institutional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) (Mubarok, 2013). Peningkatan kepemilikan institusional (lebih dari 5%) akan menyebabkan usaha pengawasan yang lebih besar sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik dari manajer, sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham (Rachmadan, 2013). Investor institusional akan lebih memilih dan mendukung kebijakan yang dapat meningkatkan insentif jangka panjang bagi perusahaan. Adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen dalam meminimalkan risiko yang ada.

Dewan komisaris Independen bisa mencerminkan tingkatan transparansi dalam industri ataupun organisasi. Dengan terdapatnya komisaris independen bagaikan media dalam tingkatkan mutu pemantauan terhadap perencanaan serta implementasi manajemen risiko yang setelah itu berakibat pada penangkalan terhadap kecurangan, serta sikap oportunistik dari pihak manajemen (Agista & Mimba, 2017). Teori keagenan menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif dan tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen & Meckling, 2014).

Komite audit bagaikan komite penunjang dewan komisaris diprediksi bisa pengaruhi aplikasi pengungkapan resiko. Perihal tersebut diprediksi dengan efektifnya keberadaan serta kinerja komite audit bisa menolong dewan komisaris

dalam guna pengawasan, khususnya dalam membenarkan kalau laporan keuangan sudah disajikan secara normal cocok dengan prinsip akuntansi yang berlaku universal (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2016). Semakin besar jumlah anggota komite audit dalam industri bisa mempengaruhi luas pengungkapan risiko (Mubarok, 2013).

Komite manajemen risiko merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang bertugas untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan memastikan diterapkannya manajemen risiko perusahaan (Agista & Mimba, 2017). Keberadaan komite manajemen risiko dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko, serta mendorong perusahaan untuk mengungkapkan risiko yang dihadapi (Utami, 2015). Perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko akan lebih fokus dalam menyelesaikan berbagai risiko yang dihadapi sehingga pengungkapan manajemen risiko menjadi lebih luas.

Ukuran perusahaan adalah tingkatan dari suatu perusahaan yang menunjukkan kekayaan perusahaan melalui kapasitas tenaga kerja, kapasitas produksi, dan kapasitas modal yang digunakannya (Tarantika & Solikhah, 2019). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin banyaknya aktivitas yang dilakukan perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi risiko ketidakpastian yang tinggi. Perusahaan besar harus melakukan pengungkapan manajemen risiko secara lebih luas dan memadai dalam menghindari kemungkinan terjadinya risiko ketidakpastian dan untuk transparansi informasi kepada para pengguna laporan dan pemangku kepentingan (Kristiono & Al-azhar, 2014). Menurut teori keagenan, perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Sehingga mereka akan memperluas pengungkapan manajemen risiko untuk mengurangi biaya keagenan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Lokaputra, 2022) yang meneliti tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan jasa keuangan non bank yang terdaftar pada BEI tahun 2016-2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sektor perusahaan yaitu peneliti ini menggunakan sektor perbankan, penelitian ini juga

menambahkan variabel ukuran perusahaan, dan penelitian ini menggunakan pengukuran variabel dependen menggunakan *International Standar Organization* (ISO, 2018).

Hal diatas mendorong ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak meluas, terarah dan sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka pembahasan masalah perlu dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *good corporate governance* dan ukuran perusahaan.
2. Variabel dependen yaitu pengungkapan manajemen resiko.
3. Penelitian yang dilakukan hanya pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) perusahaan perbankan.
4. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko?
3. Apakah komisaris indenpenden berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko?
5. Apakah komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko?

6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.
2. Untuk membuktikan secara empiris kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.
3. Untuk membuktikan secara empiris komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.
4. Untuk membuktikan secara empiris komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.
5. Untuk membuktikan secara empiris komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.
6. Untuk membuktikan secara empiris ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya dibidang akuntansi. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan mengenai pengungkapan manajemen risiko, *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi para investor

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pertimbangan kepada investor dalam mengambil keputusan untuk investasi.

###### b. Bagi manajemen perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pemahaman tentang pengungkapan risiko untuk memperbaiki praktik pengungkapan risiko diperusahaan.



## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi memuat tentang teori- teori yang mendukung penelitian ini. Terdapat juga variabel y, variabel x, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan bangunan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variabel populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang deskripsi data, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan saran yang merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberi saran bagi peneliti selanjutnya, sebagai hasil pemikian penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini berisi tentang referensi jurnal, buku, maupun kajian Pustaka penelitian lainnya.

### **LAMPIRAN**

Bagian ini berisi lampiran data-data yang digunakan selama proses penelitian, baik itu data bahan penelitian hingga hasil olahan data.